



**PENERAPAN SANKSI PEMBATAHAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

VICTOR ERIC FRANCISCUS GULTOM

2010622050

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Tesis ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hokum yang berlaku.

Nama : Victor Eric Franciscus Gultom

NRP 2010622050

Tanggal : 05 Juli 2022

Tanda tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Victor Eric Franciscus Gultom

NRP : 2010622050

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penerapan Sanksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim). Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Yang menyatakan

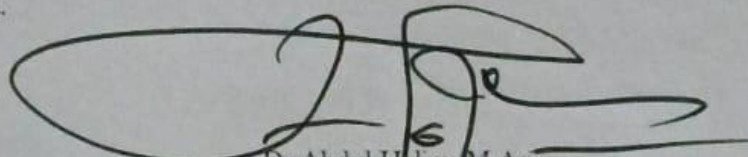


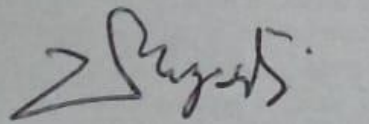
Victor Eric Franciscus Gultom

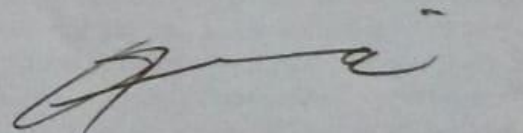
PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : Victor Eric Franciscus Gultorn
NRP : 2010622055
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penerapan Sanksi Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus
Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Abdul Halim, M.Ag
Ketua Penguji


Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Penguji I


Dr. Taufiqurrohman Svahuri, S.H., M.H.
Penguji II


Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan


Dr. Beniharmori Harefa, S.H., LL.M.
Kaprod

Ditetapkan di : Juli 2022
Tanggal Ujian : Juli 2022

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia salah satunya adalah Indonesia, sehingga dalam menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan- kebijakan diantaranya penerapan sosial distancing, physical distancing, sampai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta menerbitkan aturan tentang protocol kesehatan dan sanksi bagi pelanggar. Kebijakan PSBB ini merupakan objek yang dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dikarenakan PSBB merupakan bentuk dari karantina kesehatan, Pemberian sanksi pidana ini untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan PSBB. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan PSBB dirasa kurang tepat, hal itu didasari pada sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Maksudnya jika suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur lain maka hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi PSBB, Perspektif Hukum Pidana

ABSTRACT

Indonesia is a law-based country, thereby any human or social activity on a regular basis must be based upon the rules of law and norms applying in society. Law cannot be separated from human life since it governs human behavior. Since the Covid-19 pandemic has struck the world including Indonesia, the government has issued several policies including the implementation of social distancing, physical distancing and Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) or Large- Scale Social Restrictions; and issued rules for health protocols and sanctions for violators. The PSBB policy is as referred in Article 93 of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine since PSBB is a form of health quarantine. The criminal sanctions are applied to cause a deterrent effect to PSBB policy violators. The imposition of criminal sanctions on violators of the PSBB policy is deemed inaccurate since it is based on the criminal sanction itself whose one principle in Indonesian criminal law that regulates rules of criminal law which is ultimum remedium. This means that if a case can be resolved by other means, then criminal law should be used as a last resort in law enforcement.

Keywords: Implementation of PSBB's Sanctions, Criminal Law Perspective

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Semesta Alam atas anugerah iman dan kedamaian yang dilimpahkan-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya yang berjudul ‘PENERAPAN SANKSI PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim).’

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta :
2. Bapak Dr. Abdul Halim, S.H., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dewi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

7. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tulisan ini semata-mata sebagai sumbangsih pemikiran penulis sebagai upaya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar pembatasan sosial berskala besar sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 05 Juli 2022



Victor Eric Franciscus Gultom

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penulisan	5
E. Kerangka Teori dan Konseptual	6
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian Sanksi.....	26
B. Pengertian Pandemi Covid-19	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan	27
BAB III METODOLOGI PENULISAN	31

A.	Tipe Penelitian	31
B.	Sifat Penelitian	32
C.	Sumber Data.....	32
D.	Pengumpulan Data	32
E.	Data Hasil.....	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A.	Penerapan Sanksi Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	35
B.	Konstruksi Sanksi Pidana Atas Rumusan Delik Dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan	41
BAB V	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA